Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/05/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya percepatan pencapaian MDGs yang telah disusun dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian MDGs dan telah disahkan oleh masing-masing Gubernur, perlu dilakukan perubahan terhadap Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 14/M.PPN/HK/02/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi RAD MDGs, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim RAD MDGs dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 April 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/05/2014
TANGGAL 26 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

Sekretaris : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Inspektur Utama Bappenas;
11. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;
12. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;
13. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Sekretaris Utama BKKBN;
15. Direktur Jenderal Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.

B. PENANGGUNG ...

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas.

a. Pokja I Penangulangan Kemiskinan

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kasubdit Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :
1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kasubdit Pendukung Pasar Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kasubdit Kualitas Tenaga Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kasubdit Bantuan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Drs. I Gde Sugihamretha, MPM;
9. Dra. Esti Nurhayati, MM;
10. Dani Ramadan, S.Si, MHR;
11. Riya Farwati, SE, MSE, MA;
12. Hariyadi, S.Si;
13. Annissa Sri Kusumawati, ST;
14. Indah Erniawati, S.Sos.

Tenaga Pendukung : Marliana NL Malik, S.Sos.

b. Pokja II Pendidikan dan Gender

Ketua : Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Suprapto Budinugroho, ST, M.Eng.

Anggota :
1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Perencanaan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;
5. Ir. Suharti, MA, Ph.D;

6. Drs. M. Sjuhdi ...

6. Drs. M. Sjuhdi Rasjid;
7. Ir. Destri Handayani, ME;
8. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;
9. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
10. Setyo Hari Priyono, S.IP;
11. Kalihputro Fachriansyah, ST;
12. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn;
13. Aini Harisani, SE;
14. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos.

Tenaga Pendukung : Erna Rosita.

c. Pokja III Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Dr. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH.

Anggota :
1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN /Bappenas;
4. Kasubdit Peternakan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Sularsono, SP, ME;
6. Entos, SP, MPHM;
7. Ir. Ani Pudyastuti, MA;
8. Aris Subiyono, SH;
9. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
10. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
11. Inti Wikanestri, SKM, MPA;
12. Vivi Andriani, ST, M.Sc;
13. Sidayu Ariteja, SE;
14. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;
15. Renova Glorya Monteori Siahaan, SE, M.Sc.

Tenaga Pendukung :
1. Edy Budi Utomo;
2. Sulaeman.

d. Pokja IV Kelestarian dan Lingkungan Hidup

Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN /Bappenas;
6. Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kasubdit Pengembangan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kasubdit Minyak dan Gas Bumi, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kasubdit Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan, Kementerian PPN /Bappenas;
10. Kasubdit Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Anna Amalia, ST;
12. Irfan Darliazi Yananto, SE;
13. Nur Aisyah, ST;
14. Lelly Hasni Pertamawati, S.Pi, MM.

Tenaga Pendukung : 1. Novi Nur Asih, A.Md;
2. Sarwoto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Emmy Suparmiatun